



# **LAPORAN HASIL DISKUSI SIDANG KOMISI III REMBUG NASIONAL PENDIDIKAN TAHUN 2011**

Rembuk Nasional Pendidikan  
Sawangan, 18 Maret 2011

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan Nasional

# TIM PERUMUS

---

1. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah
2. Staf Ahli Menteri Bidang Organisasi dan Manajemen
3. Sekretaris Badan Pengembangan SDMP dan PMP
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
5. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Ditjen Dikmen
6. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Ditjen Dikmen
7. Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dikmen, Ditjen Dikmen
8. Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikmen, Ditjen Dikmen

# ANGGOTA KOMISI III

NO	PESERTA	JUMLAH
1	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi	5
2	Rektor Perguruan Tinggi	7
3	Direktur Politeknik	4
4	Kepala Kopertis	2
5	Kepala LPMP	5
6	Kepala P4TK dan BPPNFI	3
7	Kepala Dinas Kabupaten/Kota	70
8	Atase Pendidikan	3
9	Ketua BAN-SM	1
10	Direktur SEAMEO RECFON	1
TOTAL		101

# OUTLINE

1

## Topik Sidang Komisi III

*“ Meningkatkan Ketersediaan dan Keterjangkauan Layanan  
**Pendidikan Menengah** Bermutu, Relevan, dan Berkesetaraan Secara  
Efisien dan Efektif “*

2

## Isu strategis Dikmen

- Ketersediaan
- Relevansi/Mutu
- Keterjangkauan
- Kesetaraan

3

## Pendekatan Menyusun Strategi & Rekomendasi

- Resource sharing
- Integrasi proses
- TIK

4

## Hasil Pembahasan Sidang Komisi III

- Strategi Umum
- Strategi Pelaksanaan
- Implementasi

# 1. Topik Komisi III

---

*“ Meningkatkan Ketersediaan dan Keterjangkauan Layanan **Pendidikan Menengah** Bermutu, Relevan, dan Berkesetaraan Secara Efisien dan Efektif “*

## 2. ISU-ISU STRATEGIS DIKMEN

### A. KETERSEDIAAN

- Daya tampung SM (SMA, SMK, SMLB, dan Paket C) belum memenuhi lulusan SMP dan sederajat
- Masih ada wilayah yang belum tersedia SM, seperti daerah tepencil, daerah terisolir, daerah perbatasan.

### B. KETERJANGKAUAN

- Masih ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk bersekolah SM
- Masih ada sebagian masyarakat yang berada cukup jauh dari lokasi SM

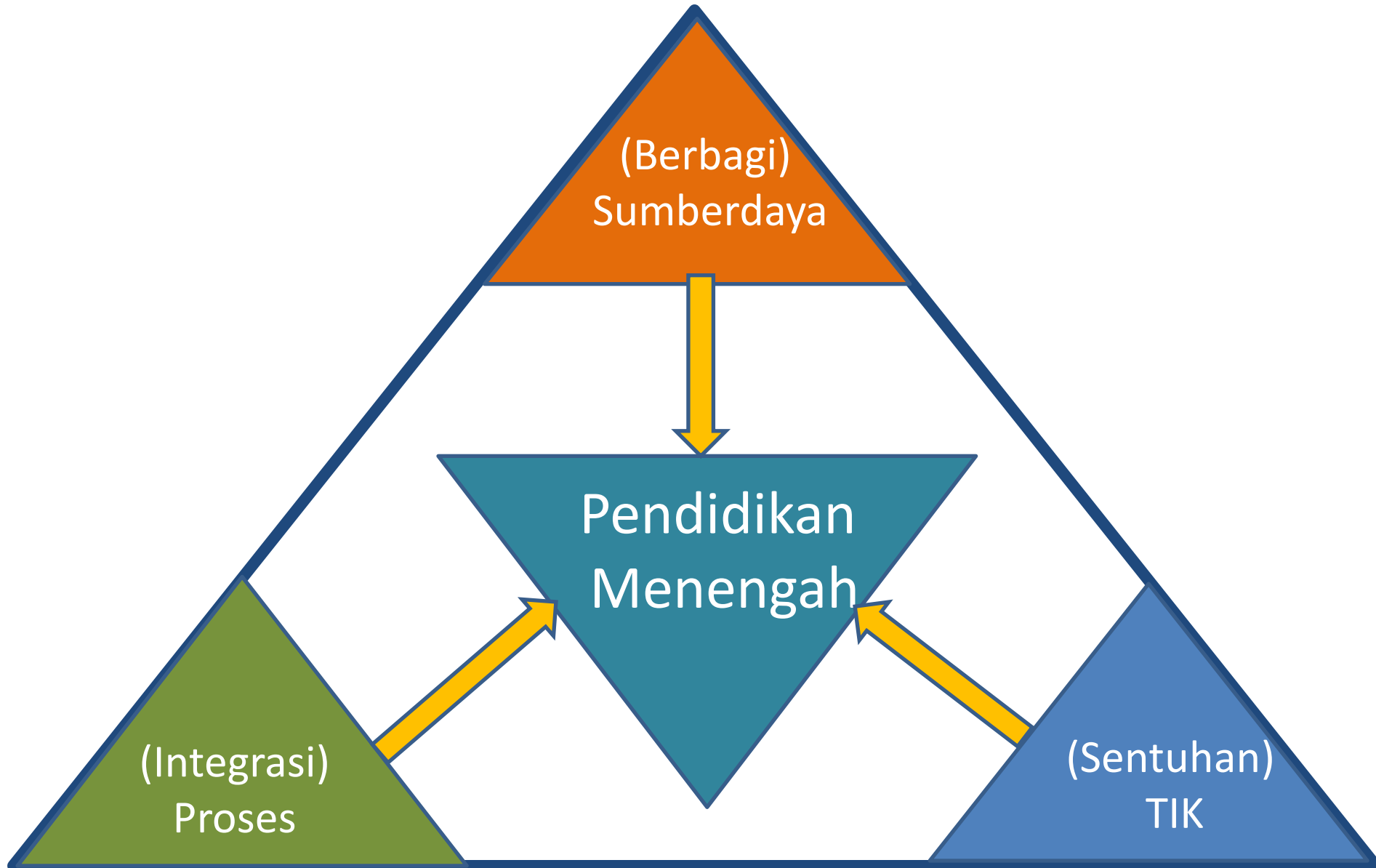
### C. KUALITAS & RELEVANSI

- Peningkatan kualitas sekolah dan siswa lulusan SM
- Peningkatan kualitas PTK (kualifikasi, mismatch, kompetensi, sertifikasi dan distribusi)
- Pembelajaran berbasis TIK
- Penerapan pendidikan karakter
- Kebijakan RSBI
- Relevansi Pendidikan SMA ke PT
- Relevansi Pendidikan SMK, SMLB, dan Paket C ke dunia kerja

### D. KESETARAAN

- Disparitas Layanan Pendidikan Menengah antar wilayah, gender, kaya-miskin, desa-kota, dan daerah khusus

### 3. Pendekatan Penyusunan Strategi & Implementasi





## **HASIL PEMBAHASAN SIDANG KOMISI III**

---



# IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH (1)

NO	STRATEGI UMUM	STRATEGI PELAKSANAAN	IMPLEMENTASI
1	Integrasi Dukungan Ketersediaan Pendidikan Menengah	Pemetaan dukungan Ketersediaan pendidikan menengah dari pusat, provinsi, kab/kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MoU dengan Stakeholder.</li> <li>2. Pemberian Bantuan Stimulan dengan Model Sharing.</li> </ol>
2	Integrasi Pemberian Penghargaan kepada stakeholder	Menyediakan penghargaan bagi Propinsi. Kab/Kota, Masyarakat yang berperan aktif dalam peningkatan akses Dikmen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghargaan propinsi yang pertumbuhan aksesnya tinggi;</li> <li>2. Memilih industri, masyarakat dan komite sekolah yang berperan dalam peningkatan akses untuk diberikan penghargaan.</li> </ol>

# IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH (2)

NO	STRATEGI UMUM	STRATEGI PELAKSANAAN	IMPLEMENTASI
3	Berbagi PTK Dikmen	Meningkatkan ketersediaan PTK dalam rangka pemenuhan kebutuhan PTK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan kebutuhan guru dikmen;</li> <li>2. Mendukung pemenuhan kebutuhan PTK Dikmen;</li> <li>3. Mendukung pelaksanaan pemerataan PTK Dikmen;</li> </ol>
4	Intergrasi Standar Pelayanan Minimal Dikmen	Pemetaan Standar Pelayanan Minimal Dikmen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompilasi kebutuhan stakeholder tentang SPM Dikmen;</li> <li>2. Penyusunan SPM berdasarkan best practice;</li> <li>3. Uji Publik terhadap kelayakan Standar Pelayanan minimal.</li> </ol>

# IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH (3)

NO	STRATEGI UMUM	STRATEGI PELAKSANAAN	IMPLEMENTASI
5	Integrasi Penyediaan beasiswa untuk siswa Dikmen	Penyediaan anggaran beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu dengan berkolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan industri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung Pemetaan Dini seluruh lulusan SLTP, baik tahun ini atau tahun lalu;</li> <li>2. Menyediakan kartu beasiswa bagi lulusan SLTP dari kalangan kurang mampu dan yang berprestasi.</li> </ol>
6	Berbagi fasilitas pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan CSR industri atau perusahaan untuk pengembangan satuan pendidikan</li> <li>2. Berbagi pembiayaan antara orang tua kaya dan miskin</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memetakan dan menjalin kerjasama dengan industri yang memiliki CSR</li> <li>2. Pengembangan trust account sekolah yg memiliki dana publik</li> <li>3. Subsidi silang pembiayaan sekolah, yang miskin gratis, yang kaya membayar lebih</li> </ol>

# IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH (4)

NO	STRATEGI UMUM	STRATEGI PELAKSANAAN	IMPLEMENTASI
7	Berbagi fasilitas pendidikan	Pemanfaatan fasilitas untuk pembelajaran bersama dan pengembangan potensi peserta didik	Pemetaan cluster sekolah yang bisa berbagi fasilitas bersama, seperti fasilitas olahraga, laboratorium, ruang praktek, ruang kesenian, dll
8	Berbagi bahan ajar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sharing bahan ajar (konten pembelajaran)</li> <li>2. Guru mengajar tidak hanya pada satu satuan pendidikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan bahan ajar melalui MGMP, kemudian dipakai bersama</li> <li>2. Guru Paket C dari guru SMA atau guru suatu SMA dari guru SMA lain</li> </ol>

# IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH (5)

NO	STRATEGI UMUM	STRATEGI PELAKSANAAN	IMPLEMENTASI
9	Berbagi fasilitas umum	Pemanfaatan fasilitas umum untuk menunjang pembelajaran	Penggunaan stadion olahraga untuk praktek olahraga peserta didik
10	Berbagi fasilitas pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) industri atau perusahaan untuk pengembangan satuan pendidikan</li> <li>2. Berbagi pembiayaan antara orang tua kaya dan miskin</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memetakan dan menjalin kerjasama dengan industri yang memiliki CSR</li> <li>2. Pengembangan trust account sekolah yg memiliki dana publik</li> <li>3. Subsidi silang pembiayaan sekolah, yang miskin gratis, yang kaya membayar lebih</li> </ol>

# IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH (6)

NO	STRATEGI UMUM	STRATEGI PELAKSANAAN	IMPLEMENTASI
11	Integrasi sosialisasi program	Sinergi beberapa kegiatan sosialisasi program dan kebijakan	Sosialisasi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) dilakukan dalam sosialisasi KTSP
12	Integrasi pengumpulan data	Pengumpulan data melalui proposal permohonan blockgrant dan program lain yang melibatkan sekolah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan instrumen tunggal Laporan Individu Sekolah Nasional (LISN) untuk pendataan</li> <li>2. Mewajibkan sekolah pemohon blockgrant mengisi LISN</li> <li>3. Mewajibkan sekolah peserta bimbingan teknis mengisi LISN</li> </ol>

# IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH (7)

NO	STRATEGI UMUM	STRATEGI PELAKSANAAN	IMPLEMENTASI
13	Integrasi Pendidikan Karakter	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran melalui <i>hidden curriculum</i></li> <li>2. Integrasi pendidikan karakter dalam setiap kegiatan yang melibatkan sekolah dan siswa</li> <li>3. Integrasi pendidikan karakter melalui proses habituasi sebagai bagian dari manajemen sekolah dalam pengembangan kultur sekolah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menegakkan <i>code conduct</i> dalam pembelajaran dan evaluasinya</li> <li>2. Revitalisasi program UKS, OSIS, pramuka, pencegahan perilaku menyimpang siswa</li> <li>3. Memasukan berbagai unsur karakter sebagai salah satu komponen kegiatan</li> </ol>

# IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH (8)

NO	STRATEGI UMUM	STRATEGI PELAKSANAAN	IMPLEMENTASI
14	Integrasi vertikal SMA dengan PT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelarasan mapel SMA dengan PT</li> <li>2. Integrasi UN dengan Seleksi Masuk PT</li> <li>3. Integrasi seleksi Olimpiade dengan Seleksi Masuk PT</li> <li>4. Pengembangan labschool</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan mapel tingkat PT di SMA (advance placement course) bagi siswa SMA berprestasi</li> <li>2. Pengusulan hasil UN sebagai kriteria seleksi masuk PT</li> <li>3. Juara-juara olimpiade di tingkat SM dapat diterima di PT tanpa seleksi</li> <li>4. Tracking nilai rapor mulai semester I sampai semester V</li> <li>5. Pemetaan dan identifikasi SMA yang ada untuk dikembangkan menjadi labschool</li> <li>6. Kerjasama antara Pemda dengan LPTK terdekat yang berminat</li> </ol>



# IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH (9)

NO	STRATEGI UMUM	STRATEGI PELAKSANAAN	IMPLEMENTASI
15	Pemanfaatan e_learning	Penyediaan internet sekolah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian layanan internet melalui Jardiknas</li> <li>2. Pemberian blockgrant untuk penyediaan fasilitas internet</li> </ol>
		Pengembangan bahan ajar berbasis TIK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan pembuatan bahan ajar dan bahan ujian berbasis TIK</li> <li>2. Pengembangan beberapa sekolah unggulan untuk menjadi pusat sumber belajar</li> </ol>
		Pengembangan dan pemanfaatan e_book	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelian hak cipta buku mapel, untuk dijadikan buku elektronik dan gratis di download.</li> <li>2. Pemanfaatan e-book sebagai pegangan guru dalam menyiapkan bahan ajar</li> </ol>

# IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH (10)

NO	STRATEGI UMUM	STRATEGI PELAKSANAAN	IMPLEMENTASI
16	Pemanfaatan e-administrasi	Pemanfaatan TIK untuk pengelolaan administrasi	1. Pengelolaan administrasi sekolah berbasis TIK, contoh Paket Aplikasi Sekolah (PAS) 2. Evaluasi diri sekolah
17	Pemanfaatan e-layanan publik	Pemanfaatan TIK untuk pelayanan informasi publik	1. Penyediaan informasi sekolah untuk diakses ortu dan masyarakat 2. Pengembangan portal pendidikan untuk melayani publik

# IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH (11)

NO	STRATEGI UMUM	STRATEGI PELAKSANAAN	IMPLEMENTASI
18	Integrasi penyalarsan program SMK dan DUDI/dunia kerja	Menyesuaikan program yang ada di SMK dengan kebutuhan DUDI/dunia kerja ( <i>capacity based curriculum</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan kebutuhan DUDI dengan jurusan SMK</li> <li>2. Membuka jurusan di SMK yang sesuai dengan kebutuhan Industri;</li> <li>3. Meniadakan jurusan yang tidak dibutuhkan oleh Industri;</li> <li>4. Penyusunan standar kompetensi lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan industri;</li> <li>5. Pemasaran tamatan SMK (job matching)</li> <li>6. Pelestarian keunggulan lokal</li> </ol>

# IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH (12)

NO	STRATEGI UMUM	STRATEGI PELAKSANAAN	IMPLEMENTASI
19	Integrasi pendidikan enterpreneur dalam proses pembelajaran	Memberikan pembelajaran dan praktek tentang berwirausaha dan berbisnis di Dikmen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kewirausahaan SMK/ Teaching Industry;</li> <li>2. Pembelajaran perakitan peralatan praktek SMK;</li> <li>3. Pembelajaran perakitan alat pendukung kewirausahaan yang dilanjutkan dengan pembuatan komponen.</li> </ol>
20	Intergrasi Program Industri Kreatif dalam pembelajaran	Mengembangkan SMK model berbasis industri kreatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan pembelajaran wirausaha pendukung industri kreatif;</li> <li>2. Mengembangkan kemitraan antara SMK dengan Industri.</li> </ol>

# IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH (13)

NO	STRATEGI UMUM	STRATEGI PELAKSANAAN	IMPLEMENTASI
21	Integrasi program pencitraan SM	Pencitraan SM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi SM melalui media cetak dan elektronik;</li> <li>2. Meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam pencitraan SM.</li> </ol>
22	Integrasi Program "3+1" di SMK kemitraan dengan industri dan politeknik	Pemetaan SMK "3+1" model bersama poltek dan industri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan peraturan perundangan yang memayungi program SMK "3+1" bersama poltek dan industri;</li> <li>2. Penyusunan kurikulum dan program SMK "3+1" bersama poltek dan industri;</li> <li>3. Membuka program SMK "3+1" bersama poltek dan industri.</li> </ol>

# IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH (14)

NO	STRATEGI UMUM	STRATEGI PELAKSANAAN	IMPLEMENTASI
23	Integrasi Pemetaan Data PK/PLK Dikmen	Menyusunan Peta PK/PLKdikmen berbasis keunggulan, budaya dan wilayah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan PK/PLKberbasis wilayah, keunggulan dan budaya;</li> <li>2. Koordinasi dengan daerah yang mempunyai potensi untuk pengembangan program afirmasi;</li> <li>3. Pemberian bantuan untuk pengembangan program afirmasi.</li> </ol>
24	Berbagi Fasilitas Pendidikan Menengah di daerah khusus	Membangun SM model komprehensif di wilayah khusus.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan SM Model di wilayah khusus;</li> <li>2. Memberikan bantuan sarana dan prasarana SM model;</li> <li>3. Memberikan insentif untuk guru di daerah khusus.</li> </ol>

# IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH (15)

NO	STRATEGI UMUM	STRATEGI PELAKSANAAN	IMPLEMENTASI
25	Integrasi kegiatan PK/PLK Dikmen	Menyusun rencana aksi PK/PLK SM secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi program yang diperlukan untuk mengembangkan program afirmasi;</li> <li>2. Menyiapkan kebutuhan anggaran untuk mendukung program afirmasi;</li> </ol>
26	Integrasi redistribusi guru inter dan antar kab/kota, provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi Antar Kementerian Terkait</li> <li>2. Koordinasi Antar Provinsi, Antar Kab/Kota</li> <li>3. Analisis Kebutuhan Guru Per Sekolah/ Kab/Kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bersama Mendiknas, Menag, Mendagri, Dan Menegpan</li> <li>2. Sistem Informasi Tentang Kebutuhan Dan Pemerataan Guru</li> <li>3. Redistribusi Guru inter dan antar Kab/Kota</li> <li>4. Penegakan aturan beban mengajar guru secara konsisten</li> </ol>

# IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH (16)

NO	STRATEGI UMUM	STRATEGI PELAKSANAAN	IMPLEMENTASI
27	Integrasi ketersediaan guru produktif SM	Pemetaan guru produktif yang dapat di hasilkan dari masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan kebutuhan guru produktif;</li> <li>2. Pemodelan pengadaan guru produktif yang berasal dari masyarakat;</li> <li>3. Fasilitasi pemenuhan kebutuhan guru produktif yang berasal dari masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> </ol>
		Alih fungsi dan intensifikasi guru produktif, adaptif dan normatif SMK, serta guru SMA yang relevan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan pendidikan profesi guru khusus untuk produktif SMK</li> <li>2. Perlunya pelatihan yang intensif bagi guru produktif SMK</li> <li>3. Pemberian sertifikat keahlian bagi guru produktif SMK</li> <li>4. Pemenuhan beban kerja mengajar dengan penugasan di beberapa sekolah baik negeri maupun swasta</li> </ol>



# IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH (17)

NO	STRATEGI UMUM	STRATEGI PELAKSANAAN	IMPLEMENTASI
		Rekrutmen baru melalui koordinasi Ditjen Dikmen dengan perguruan tinggi, MENNEGPAN, BKN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian formasi guru SLB</li> <li>2. Perguruan tinggi membuka program studi SLB</li> <li>3. Dilakukan pendidikan profesi guru khusus untuk pendidikan khusus terutama untuk SLB</li> <li>4. Perlunya pelatihan yang intensif bagi guru SLB</li> <li>5. Pemberian sertifikat keahlian bagi guru SLB</li> </ol>
		Rekrutmen baru melalui koordinasi Ditjen Dikmen, Ditjen Dikti dengan perguruan tinggi, MENNEGPAN, BKN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian formasi guru produktif SMK</li> <li>2. Perguruan tinggi membuka program studi produktif SMK yang langka</li> </ol>

# IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH (18)

NO	STRATEGI UMUM	STRATEGI PELAKSANAAN	IMPLEMENTASI
28	Integrasi penyediaan pengawas dan dikmen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis kebutuhan pengawas sekolah dikmen di setiap kab/kota dan provinsi</li> <li>2. Koordinasi Ditjen Dikmen dengan dinas pendidikan kab/kota , dan provinsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Membuat sistem informasi kebutuhan dan pemerataan pengawas sekolah dikmen</li> <li>2.Rekrutmen baru melalui koordinasi Ditjen Dikmen dengan dinas pendidikan kab/kota, dan provinsi</li> <li>3.LPMP memberikan fasilitasi penyediaan data, mapping, dan peningkatan kompetensi</li> </ol>

# IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH (19)

NO	STRATEGI UMUM	STRATEGI PELAKSANAAN	IMPLEMENTASI
29	Integrasi penyediaan kepala sekolah dikmen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis kebutuhan kepala sekolah dikmen di setiap kab/kota dan provinsi</li> <li>2. Koordinasi Ditjen Dikmen dengan dinas pendidikan kab/kota, dan provinsi dalam penyiapan calon kepala sekolah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat sistem informasi kebutuhan dan pemerataan kepala sekolah dikmen</li> <li>2. Rekrutmen baru melalui koordinasi Ditjen Dikmen dengan dinas pendidikan kab/kota, dan provinsi</li> <li>3. LPMP memberikan fasilitasi penyediaan data, mapping, dan peningkatan kompetensi</li> <li>4. Periodisasi penugasan kepek dan penilaian kinerja kepek</li> </ol>
30	Integrasi penyediaan tutor/fasilitator Paket C	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis tutor/fasilitator Paket C di setiap kab/kota dan provinsi</li> <li>2. Koordinasi Ditjen Dikmen dengan dinas pendidikan kab/kota dan provinsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat sistem informasi kebutuhan dan pemerataan tutor/fasilitator Paket C</li> <li>2. Rekrutmen baru melalui koordinasi Ditjen Dikmen dengan dinas pendidikan kab/kota dan provinsi</li> </ol>

# IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH (20)

NO	STRATEGI UMUM	STRATEGI PELAKSANAAN	IMPLEMENTASI
31	Integrasi peningkatan kualifikasi akademik guru dikmen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis dan pemetaan guru dikmen yang belum S1/D-IV</li> <li>2. Koordinasi antara Ditjen Dikmen dengan perguruan tinggi, dinas pendidikan kab/kota dan provinsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas pendidikan kab/kota dan provinsi mendata guru dikmen yang belum S1/D-IV dan yang sedang kuliah</li> <li>2. Pemberian bantuan studi dari pemerintah kab/kota, provinsi dan pusat kepada guru guru dikmen yang belum S1/D-IV</li> <li>3. Perguruan tinggi membuka program studi langka</li> <li>4. Percepatan peningkatan kualifikasi melalui program Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) kepada guru yang belum S1/D-IV di perguruan tinggi yang telah ditunjuk oleh Mendiknas</li> </ol>

# IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH (21)

NO	STRATEGI UMUM	STRATEGI PELAKSANAAN	IMPLEMENTASI
32	Integrasi Sertifikasi guru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis dan Pemetaan guru Dikmen per mata pelajaran yang sudah dan yang belum bersertifikat guru</li> <li>2. Koordinasi antara Ditjen Dikmen, Badan PSDMP &amp; PMP dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota, Provinsi dan LPMP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperlukan pendataan yang akurat, validasi dan analisis, serta pelaporan dari setiap kabupaten/kota, provinsi, dan nasional tentang guru yang sudah dan belum bersertifikat guru</li> <li>2. Menjaring data dan informasi guru penerima tunjangan profesi di kab/kota</li> <li>3. Memantau dan mengkaji dampak pemberian tunjangan profesi terhadap kinerja guru dikmen</li> <li>4. E-layanan pelaksanaan sertifikasi guru melalui NUPTK online</li> </ol>

# IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH (22)

NO	STRATEGI UMUM	STRATEGI PELAKSANAAN	IMPLEMENTASI
33	Integrasi peningkatan kompetensi guru berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan MGMP/MKKS/MKPS sebagai wadah pengembangan keprofesian berkelanjutan</li> <li>2. Penyiapan kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam penilaian kinerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan peran serta Pemda dalam pemberdayaan MGMP/MKKS/MKPS</li> <li>2. Pemetaan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas</li> <li>3. Fasilitasi guru untuk melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan</li> <li>4. Implementasi penilaian kinerja guru</li> </ol>

# IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH (23)

NO	STRATEGI UMUM	STRATEGI PELAKSANAAN	IMPLEMENTASI
34	Integrasi ketersediaan dan peningkatan kualitas tendik	Koordinasi Ditjen Dikmen dengan dinas pendidikan kab/kota, dan provinsi dalam penyediaan kebutuhan tendik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat sistem informasi kebutuhan dan pemerataan tendik</li> <li>2. Rekrutmen baru melalui koordinasi Ditjen Dikmen dengan dinas pendidikan kab/kota, dan provinsi</li> <li>3. Keselarasan ketersediaan tendik dengan pembangunan ruang perpustakaan dan laboratorium sekolah</li> <li>4. Fasilitasi tendik untuk melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan</li> <li>5. Implementasi penilaian kinerja tendik</li> </ol>
35	Integrasi pendirian USB – penyediaan PTK dan sarana lainnya	Pembangunan gedung sekolah baru terintegrasi dengan penyediaan PTK dan sarana lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pusat, provinsi, kab/kota dalam pendirian sekolah baru</li> <li>2. Sinergi perencanaan sampai dengan implementasi dalam pendirian sekolah baru</li> </ol>

# IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH (24)

NO	STRATEGI UMUM	STRATEGI PELAKSANAAN	IMPLEMENTASI
36	Integrasi Pengembangan karir PTK dikmen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperluas pengembangan profesi PTK Dikmen</li> <li>2. Pelaksanaan inpassing bagi guru Dikmen bukan PNS sesuai dengan Permendiknas Nomor 22 tahun 2010</li> <li>3. Pelaksanaan Penyesuaian jabatan fungsional guru sesuai dengan Permendiknas No. 38 Tahun 2010</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian bimbingan teknis yang intensif kepada guru pendidikan menengah dalam pengembangan karirnya agar mereka dapat menyusun karya inovatif, publikasi ilmiah, dan pengembangan diri sesuai dengan bidangnya.</li> <li>2. Sosialisasi pelaksanaan inpassing bagi guru Dikmen bukan PNS dan penyesuaian jabatan fungsional guru</li> </ol>



**TERIMA KASIH**